



Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

The Influence of The Implementation of Government Accounting Standards, The Use of Information Technology and The Follow Up of Audits by The Republic of Indonesia Audit Agency On The Quality of Financial Reports

Arini^{1*}, Agita Citra Handayani Putri², Zaharman³

Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

E-mail: arini@unilak.ac.id, agita.citra@gmail.com, zaharman@unilak.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 30-12-2025

Accepted: 30-12-2025

Published: 31-12-2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi, dan pelaksanaan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Sektor Administrasi Negara dengan jumlah 52 orang dengan metode sensus, sehingga seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi, dan pelaksanaan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pertanahan Nasional di seluruh Provinsi Riau.

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penggunaan Teknologi Informasi, Penyelesaian Audit Tindak Lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Kualitas Laporan Keuangan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of government accounting standards, the use of information technology and the completion of follow-up audits by the Republic of Indonesia's Audit Board on the quality of financial reports at the National Land Agency in Riau Province. The population in this study were State Administration Section Employees with a population of 52 people with the census method, so the entire population became the sample in this study. Data analysis used multiple linear regression. The results of the study explain that the application of government accounting standards, the use of information technology and the completion of follow-up audits by the Republic of Indonesia Audit Board have a significant influence on the quality of financial reports at the National Land Agency throughout Riau Province.

Keywords : Application of Government Accounting Standards, Use of Information Technology, Completion of Follow-up Audits by the Republic of Indonesia Audit Board and Quality of Financial Reports.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif menuntut pertanggungjawaban serta keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui regulasi tersebut, setiap pemerintahan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan basis akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan dengan basis akrual dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Fenomena yang terjadi setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK melakukan pengujian kepatuhan Badan Pertanahan Nasional terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Meskipun Badan Pertanahan Nasional mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2013 hingga 2023, terdapat masalah yang masih mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, yaitu penatausahaan aset dan persediaan, pengelolaan administrasi dan penyajian data dalam laporan keuangan, serta transparansi dalam pengelolaan PNBPT Pertanahan. Informasi dari www.finance.detik.com (19 Juli 2018) juga menyebutkan bahwa predikat WTP tidak menjamin suatu instansi bebas dari korupsi atau pemborosan anggaran.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan meliputi penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan hasil pemeriksaan BPK. Haliah (2018) menambahkan faktor-faktor lain seperti pengetahuan pengelola, kompetensi aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, komitmen organisasi, pengawasan internal, sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah, dan review laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasional Se Provinsi Riau.

TINJAUAN LITERATUR

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah bentuk transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. LKPP disusun setiap tahun untuk mendukung pengambilan kebijakan keuangan yang lebih baik, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi di dalamnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, memuat informasi posisi keuangan, kinerja, dan pertumbuhan organisasi (Purnama, 2020; Kurniawati dkk, 2020). Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan (Ningtyas, 2015). Penerapan SAP mewajibkan entitas pelaporan untuk melaporkan upaya dan hasil kegiatan secara sistematis dan terstruktur demi akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja (Wilkinson, 2000). Laporan keuangan yang disusun berpedoman pada SAP akan menjadi media pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik. Indikator penerapan SAP meliputi penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, laporan keuangan konsolidasi, dan laporan operasional (Sari dan Fadli, 2017).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi, termasuk komputer dan perangkat lunak, adalah instrumen yang meningkatkan keterampilan manusia dan memungkinkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara manual. Pemanfaatan teknologi informasi membantu dalam pengolahan data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan, teknologi informasi berperan penting dalam merinci anggaran berkualitas tinggi dan menjamin tanggung jawab, serta membantu dalam ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan menghindari kehilangan data (Riyadi, 2020; Fadli, 2017; Basid, 2019). Indikator pemanfaatan teknologi informasi meliputi jumlah komputer yang memadai, pemanfaatan jaringan internal, proses akuntansi yang terkomputerisasi, dan penggunaan perangkat lunak yang sesuai dengan undang-undang (Hardyansyah, 2016).

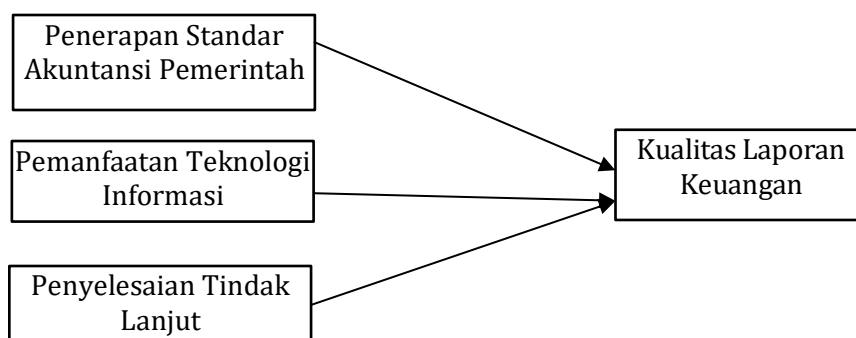
Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi, semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan, ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan pemeriksaan di tahun berikutnya. Pejabat instansi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima (UU Nomor 15 Tahun 2004). Kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dianggap sebagai pemborosan keuangan negara. BPK memantau dan menginformasikan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Lembaga Perwakilan. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dapat mengindikasikan kurangnya komitmen instansi.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah, landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan dasar tersebut, maka alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: data diolah, 2025

METODOLOGI

Populasi penelitian adalah Pegawai Bagian Tata Usaha di Badan Pertanahan Nasional Se Provinsi Riau, berjumlah 52 orang. Penelitian ini menggunakan metode sensus, di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, berupa kuesioner yang dibrikan langsung kepada responden. Sumber data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert (1-5: Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Analisis data menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Teknik analisis statistika yang diguinkan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda berganda (Sugiyono, 2017; Sugiyono, 2019).

Tabel 1. Identifikasi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> relevansi (manfaat umpan balik, manfaat prediktif tepat waktu dan lengkap), keandalan (penyajian laporan keuangan jujur, bebas kesalahan material, penerapan kebijakan akuntansi

		<p>konsisten),</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat dibandingkan (informasi dapat dibandingkan), dan • dapat dipahami (informasi mudah dipahami)
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • penyajian laporan keuangan, • laporan realisasi anggaran berbasis akrual, • laporan arus kas, • catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, • akuntansi investasi, • akuntansi aset tetap, • akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, • akuntansi kewajiban, • koreksi kesalahan, • laporan keuangan konsolidasi, dan • laporan operasional
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah komputer memadai, • pemanfaatan jaringan internal, • proses akuntansi terkomputerisasi, • penggunaan software sesuai undang-undang, • sistem informasi terintegrasi, • jadwal pemeliharaan peralatan, dan • perbaikan peralatan usang/rusak tepat waktu.
4	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (X3)	<ul style="list-style-type: none"> • proses penyelesaian tindak lanjut, • tindakan manajemen yang sesuai, • ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan, dan • penjelasan perkembangan tindak lanjut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif Variabel

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1	52	35.00	64.00	50.10	6.111
X2	52	25.00	40.00	32.88	3.939
X3	52	9.00	20.00	16.00	2.635
Y	52	23.00	35.00	29.77	3.141
Valid N (listwise)	52				

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Nilai rata-rata 50.10 (kategori "Baik"). Sebagian besar responden menyatakan penerapan SAP sudah baik, dengan beberapa indikator seperti prosedur pengakuan belanja

dan evaluasi aktivitas operasi dinilai "Sangat Baik". Nilai rata-rata 32.88 (kategori "Baik"). Responden menilai ketersediaan komputer dan integrasi sistem informasi sebagai "Sangat Baik", sementara aspek lain seperti jaringan internet dan penggunaan software juga dinilai "Baik". Nilai rata-rata 16.00 (kategori "Baik"). Penjelasan perkembangan tindak lanjut dinilai "Sangat Baik", sedangkan proses penyelesaian dan tindakan manajemen dinilai "Baik". Nilai rata-rata 29.77 (katgori "Sangat Baik"). Indikator seperti umpan balik, pencerminan kondisi keuangan, validasi, dan perbandingan antar periode dinilai "Sangat Baik", menunjukkan kualitas laporan keuangan yang tinggi.

Uji Kualitas Data

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{Tabel}	Ket
X ₁	1	0.556	0.2732	Valid
	2	0.486	0.2732	Valid
	3	0.623	0.2732	Valid
	4	0.359	0.2732	Valid
	5	0.495	0.2732	Valid
	6	0.651	0.2732	Valid
	7	0.623	0.2732	Valid
	8	0.562	0.2732	Valid
	9	0.687	0.2732	Valid
	10	0.418	0.2732	Valid
	11	0.624	0.2732	Valid
	12	0.493	0.2732	Valid
	13	0.644	0.2732	Valid
X ₂	1	0.390	0.2732	Valid
	2	0.658	0.2732	Valid
	3	0.569	0.2732	Valid
	4	0.871	0.2732	Valid
	5	0.706	0.2732	Valid
	6	0.425	0.2732	Valid
	7	0.695	0.2732	Valid
	8	0.866	0.2732	Valid
X ₃	1	0.734	0.2732	Valid
	2	0.553	0.2732	Valid
	3	0.877	0.2732	Valid
	4	0.778	0.2732	Valid
Y	1	0.770	0.2732	Valid
	2	0.510	0.2732	Valid
	3	0.625	0.2732	Valid
	4	0.381	0.2732	Valid
	5	0.508	0.2732	Valid
	6	0.600	0.2732	Valid
	7	0.697	0.2732	Valid

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Seluruh item pertanyaan untuk variabel X1, X2, X3, dan Y dinyatakan valid karena

nilai r hitung $>$ r tabel (0,2732).

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	X ₁	0.816	Reliabel
2	X ₂	0.805	Reliabel
3	X ₃	0.728	Reliabel
4	Y	0.682	Reliabel

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Seluruh variabel (X₁: 0.816, X₂: 0.805, X₃: 0.728, Y: 0.682) dinyatakan reliabel karena nilai Alpha Cronbach's $>$ 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73963618
Most Extreme Differences	Absolute	0.077
	Positive	0.077
	Negative	-0.048
Test Statistic		0.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Sumber: data Olahan SPSS, 25

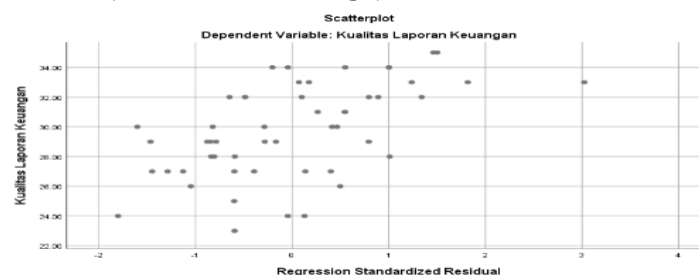
Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 ($>$ 0,05) dan penyebaran titik pada P-P Plot mengikuti garis diagonal, menunjukkan data berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.109	.003		
	X ₁	2.246	.029	.409	2.442
	X ₂	2.859	.006	.592	1.690
	X ₃	2.714	.009	.342	2.928

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Nilai VIF untuk semua variabel independen $<$ 10 (X₁=2.442, X₂=1.690, X₃=2.928) dan Tolerance $>$ 0,1, menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Grafik Scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Data Penelitian**Tabel 7. Analisis Regresi Berganda**

		Unstandardized Coefficients	
Model		B	Std. Error
1	(Constant)	7.671	2.468
	X1	.144	.064
	X2	.237	.083
	X3	.443	.163

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Persamaan regresi: $Y = 7,671 + 0,144X_1 + 0,237X_2 + 0,443X_3 + e$.

Konstanta (α) sebesar 7,671 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, kualitas laporan keuangan adalah 7,671. Koefisien regresi positif untuk X1 (0,144), X2 (0,237), dan X3 (0,443) menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel independen akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tabel 8. Uji F Simultan

Model		Sum of Squares	F	Sig.
1	Regression	348.888	36.168	.000 ^b
	Residual	154.343		
	Total	503.231		

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Nilai F hitung (36,168) > F tabl (2,80) dengan signifikansi 0,000 (< 0,05). Ini menunjukkan bahwa secara simultan, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasional Se Provinsi Riau.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.833 ^a	0.693	0.674

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Nilai Adjustd R Square sebesar 0,674 menunjukkan bahwa 67,4% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sementara 32,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Model		t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Ket
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	2.246	2,011	0.029	Sig

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana nilai t_{hitung} (2,246) > t_{tabel} (2,011) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,029 masih berada dibawah 0,05, bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Menjelaskan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasioal Se Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan Badan Pertanahan se Provinsi Riau, maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Badan Pertanahan se Provinsi Riau. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kesalahan, sehingga meningkatkan kualitas laporan Badan Pertanahan se Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra dkk (2024) dan Tabupook dkk (2024) dan Syafira (2021) menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara hasil penelitian yang berbeda dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harun (2021) menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Model		Thitung	Ttabel	Sig.	Ket
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.859	2,011	0.006	Sig

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana nilai t_{hitung} (2,859) > t_{tabel} (2,011) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,006 masih berada dibawah 0,05, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Menjelaskan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasioal Se Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin optimal Pemanfaatan Teknologi Informasi, maka dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Badan Pertanahan se Provinsi Riau. Hal ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan sudah digunakan secara optimal, komprehensif, dan secara merata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shanti dkk (2024) dan Ayem dkk (2023) menjelaskan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara hasil penelitian yang berbeda dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2020) menjelaskan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Model		Thitung	Ttabel	Sig.	Ket
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	2.714	2,011	0.009	Sig

Sumber : data Olahan SPSS, 25

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana nilai t_{hitung} (2,714) > t_{tabel} (2,011) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,009 masih berada dibawah 0,05, maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. Menjelaskan variabel penerapan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasioal Se Provinsi Riau.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara opini pemeriksaan diberikan berdasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jika laporan keuangan suatu entitas telah memenuhi semua kriteria perumusan opini di atas, maka auditor berkewajiban memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Jika terdapat kelemahan sistem pengendalian internal maka informasi keuangan yang disajikan tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Meskipun manajemen mengungkapkan informasi tersebut secara memadai (Tampubolon, 2019). Namun hal ini tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diungkapkan tidak mengandung bias informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Rahayu & Suhayati (2010) bahwa informasi tertentu mungkin dipandang relevan sehingga perlu disajikan kepada pemakai. Namun jika hakikat atau penyajian informasi itu tidak dapat diandalkan maka menyajikannya kepada para pemakai justru dapat menyesatkan. Informasi harus dapat dipercaya, yakni bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material dan dapat dipercaya oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur.

Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Manajemen sektor publik sangat berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Oleh karena itu, aspek kepatuhan terhadap peraturan perundanganundangan sangat menonjol pada setiap pelaksanaan audit sektor publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tidak menjadi penilaian utama, melainkan auditor BPK lebih fokus terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aljufri dkk (2019) dan Imtinan & Hasibuan (2021) dan Tresna dan Apandi (2016) dan Valentina (2022) menjelaskan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPKI-RI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara hasil penelitian yang berbeda dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mugiarty dkk (2018) menjelaskan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Riau. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Riau. Selain itu, penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas unit analisis, tidak hanya terbatas pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, tetapi juga mencakup lingkup yang lebih luas seperti Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel independen, antara lain kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, good governance, dan sistem informasi manajemen agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan mendalam. Selain itu, disarankan untuk menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang lebih mudah dipahami oleh responden guna meningkatkan kualitas data yang diperoleh. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode wawancara dan observasi sebagai pelengkap metode survei agar memperoleh data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

REFERENCES

- Adininggar. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada BPKAD Kota Semarang. *Skripsi: Universitas Semarang*.
- Agustin G. E. (2020). Sistem Akuntansi, Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8).
- Aljufri; Arini ; Sherly Novianti, 2019, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2(3) September 2019.
- Ayem, dkk. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Menkeu)*, 12 (1) Maret 2023.
- Fitra W. N. A, Semaun S dan Nur S. W. 2024. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *FUNDS*, 3(4) Maret 2024.
- Hardyansyah, 2016, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar). *Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Harun M. I. 2021. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi

- pada SKPD Kota Ternate). *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*, 1(1) Juni 2021.
- Imtinan G dan Hasibuan. 2021. Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 9(2) 2021.
- Kurniawati, E., Askandar, N. S., & Junaidi, 2020, Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Pemerintahan Kota Batu). 09 (08), 1-16.
- Mugiarty L, Ritchi H dan Pratama A. 2018. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2) November 2018.
- Ningtyas, P. E, 2015, Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4 (1), pp: 454-488.
- Purnama, H, 2020, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 17 (2), 403-417.
- Riyadi. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, Vol. 1 No. 2.
- Sari, G. I., & Fadli, F. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17-34.
- Shanti D. A, Suhaedi W dan Astuti W. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, 4(1) Maret 2024.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukarta, gek indah pujastuti, and dewi. (2020). Effect of Work Compensation, Motivation and Discipline on Employee Productivity. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. 4(2), 27-33.
- Syafira. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Tesis: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*.
- Tabupook A. A dan Wulandari I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 8(3) 2024. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4760>

- Tampubolon, F. M., & Hasibuan. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Oikos Jurnal (Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi)*. Vol. 3, No. 1, pp. 55-65. DOI: <https://doi.org/10.23969/oikos.v3i1.1415>
- Tresnawati, Fera dan Apandi. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). *Jurnal Aset*. Vol. 8, No. 1, 13-24.
- Valentina. (2022). Pengaruh Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*. Vol. 4, No. 6, pp. 951-970.
- Wilkinson, Josep W. Et al. (2000). *Accounting Information System Essential Concept and Application*. 4 Edition, John Willey & Sons Inc. New York-USA.